

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basri, Hasril, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Study Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Dalam Usaha Bongkar Muat Pelabuhan Indonesia)*, Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Otocaption Dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan 13 Desember 2008.

Bintoro, Tjokroarudjojo dan Mustopadidjaya AR, 1998. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Penerbit LP3ES, Jakarta

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta 2006.

Hasril, *Kepastian Usaha Bongkar Muat di Pelabuhan, Medan*, 2010.

Muis, Abdul. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum USU. Medan. 1990.

Mr. J. B. J. M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjan, *Pengantar Hukum Peradilan, Cetakan I*, Penerbit Yudika Surabaya, 1993.

Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Palmier, *Insisuri Bongkar Muat di Kapal Niaga*, Yayasan Pendidikan, Jakarta.

Rajagukguk, Emma, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Jakarta : Universitas Indonesia, 1999.

Ramdan, *Skripsi Pengaturan Kelancaran Arus Barung (Studi Tentang Proses Bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan Belawan)*. Universitas Sumatera Utara. 2007.

Profil PT. Pelindo (Persero) Cabang I Belawan Tahun 2008

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara UI Pres*. Yogyakarta, 2003.

Supatini, *Aktivitas Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM)*, Bahari Jogja Vol VIII No. 12, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka cipta, Jakarta 2007

SF Marbun, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, hlm : (8-9)

Wahyudi, *Rapat Pertemuan Tentang Koordinasi Pelayanan Perizinan Dengan Pengusaha Dan Masyarakat*, hlm : 2.

Yusril, *Peranan dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pengangkutan Barang di Laut*. Universitas Sumatera Utara, 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. *Tentang Pelayaran*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 1999. *Tentang Angkutan di Perairan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2001. *Tentang Kepelabuhan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010. *Tentang Angkutan di Perairan*.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002. *Tentang Tata Cara Bongkar Muat Barang*.

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, *Rekapitulasi Bongkar Muat*, DPW APBMI, Sumatera Utara. 2004